



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS**

SKRIPSI

**FLYPAPER EFFECT PADA DANA ALOKASI UMUM (DAU)
TERHADAP BELANJA DAERAH PADA KABUPATEN/KOTA DI
SUMATERA BARAT PERIODE 2007-2009**

Oleh :

GANTO SUARO
05 151 086

Mahasiswa Program S-1 Jurusan Ilmu Ekonomi

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**

PADANG

2010



No. Alumni Universitas

Ganto Suaro

No. Alumni Fakultas

Biodata

a) Tempat/Tanggal Lahir : Pulau Punjung/13 Mei 1987 b) Nama Orang Tua : Azizdan (Ayah), Ernida Harun (Ibu) c) Fakultas : Ekonomi d) Jurusan : Ilmu Ekonomi e) No BP : 05 151 086 f) Tgl.Lulus : 12 Mei 2010 g) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan h) IPK : 3.10 i) Lama Studi : 4 Tahun 8 Bulan j) Alamat Orang Tua : Jl. Pagambiran No. 09 RT I/RW VI Pagambiran Ampalu, Lubuk Begalung, Kota Padang.

FLYPAPER EFFECT PADA DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP BELANJA DAERAH PADA KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA BARAT PERIODE 2007-2009

Skripsi S-1 Oleh Ganto Suaro

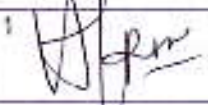


Pembimbing Dr.H.Hefrizal Handra, M.Soc.Sc

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis secara empiris adanya pengaruh DAU dan PAD terhadap Belanja Daerah, dan meneliti kemungkinan terjadinya *Flypaper Effect* pada DAU terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat periode 2007-2009. Dengan menggunakan data sekunder yang merupakan data panel (*time series* dan *cross-section*), yang diambil dari BPS Sumatera Barat dan situs resmi keuangan daerah Republik Indonesia selama periode penelitian. Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi dengan metode *Ordinary Least Squares*. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa DAU mempunyai hubungan yang positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah, sedangkan PAD mempunyai hubungan yang positif dan tidak signifikan terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Lebih besarnya pengaruh DAU daripada PAD terhadap Belanja Daerah, menjelaskan bahwa telah terjadi *Flypaper Effect* pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat periode 2007-2009

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal ; 12 Mei 2010.

Abstrak telah disetujui oleh :

Tanda Tangan			
Nama Terang	Dr.H.Hefrizal Handra, M.Soc.Sc	Drs.H.Zulkarnain Ras, M.Si	Drs.H.Masrizal, M.Soc.Sc

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Prof. Dr. H. Firwan Tan, SE, M.Ec. DEA. Ing

NIP. 130 812 952


Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke fakultas/universitas dan mendapat nomor alumnus :

		Petugas Fakultas/Universitas
No. Alumni Fakultas	Nama	Tanda Tangan
No. Alumni Universitas	Nama	Tanda Tangan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menetapkan UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 33 Tahun 2004 yang merupakan revisi terhadap UU Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 yang mengatur tentang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Kedua Undang-Undang di bidang otonomi daerah tersebut berdampak pada terjadinya pelimpahan kewenangan yang semakin luas kepada Pemerintah Daerah (PEMDA) dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan fungsi PEMDA. (Hidayat dkk, 2007).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (PEMDA) didefinisikan sebagai kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan untuk mengatur diri sendiri itu luas, nyata dan bertanggung jawab. (Rachim, 2006, dalam Maulida, 2007).

Tujuan utama penyelenggaraan Otonomi Daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (*public service*) dan memajukan perekonomian daerah. Kebijakan pemberian otonomi daerah merupakan langkah strategis dalam dua hal. Pertama, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan jawaban atas permasalahan lokal bangsa Indonesia berupa ancaman dis integrasi bangsa, kemiskinan, ketidakmerataan pembangunan, rendahnya kualitas hidup

masyarakat, dan masalah pembangunan sumber daya manusia. Kedua, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan langkah strategis bangsa Indonesia untuk menyongsong era globalisasi ekonomi dengan memperkuat basis perekonomian daerah. (Mardiasmo, 2002).

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah (PEMDA), Pemerintah Pusat (PEMPUS) akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian daerah dari Dana Bagi Hasil (DBH) yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Disamping dana perimbangan tersebut, PEMDA mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan, dan lain-lain pendapatan. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada PEMDA. Seharusnya dana transfer dari PEMPUS diharapkan digunakan secara efektif dan efisien oleh PEMDA untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Kebijakan penggunaan dana tersebut sudah seharusnya pula secara transparan dan akuntabel. (Maimunah, 2006).

Pada praktiknya, transfer dari Pemerintah Pusat (PEMPUS) merupakan sumber dana utama Pemerintah Daerah (PEMDA) untuk membiayai operasi utamanya sehari-hari, yang oleh PEMDA "dilaporkan" di perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi (kalau tidak mungkin menghilangkan) kesenjangan fiskal antar pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum diseluruh negeri. (Simanjuntak dalam Sidik dkk, 2002, dalam Maimunah, 2006).

BAB V PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Seperti yang telah dijabarkan pada Bab-Bab sebelumnya bahwa penelitian ini menganalisis *Flypaper Effect* pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah (BD) pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat periode 2007-2009.

Secara umum persentase pertumbuhan rata-rata tahun untuk masing-masing variabel BD, DAU, dan PAD pada Kabupaten/Kota di SUMBAR selalu terjadi peningkatan yaitu BD sebesar 19,77%, DAU sebesar 7,30%, dan PAD sebesar 28,61%.

Bila dirata-ratakan proporsi DAU dan PAD terhadap BD selama periode penelitian pada Kabupaten/Kota di SUMBAR, adalah proporsi DAU terhadap BD sebesar 67,30%, sedangkan proporsi PAD terhadap BD hanya sebesar 5,50%.

Berdasarkan bahasan dan temuan empiris, ada beberapa kesimpulan yang merupakan hasil penelitian, yaitu:

1. Hasil pengujian hipotesis pertama adalah diterima, artinya Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap besarnya Belanja Daerah (BD).
2. Hasil pengujian hipotesis kedua juga diterima, artinya Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap besarnya Belanja Daerah (BD).

DAFTAR PUSTAKA

- _____. UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.
- _____. UU No. 22 Tahun 1999, Tentang Pemerintahan Daerah.
- _____. UU No. 25 Tahun 1999, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah.
- _____. PP No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Aaberge, Rolf & Audun Langorgen. 2003. Fiscal and spending behavior of local governments: Identification of price effect when prices are not observed. *Public Choice* 117: 125-161.
- Deller, Steven. Craig Maher. 2006. A Model of Asymmetries in the Flypaper Effect. University of Winconsin-Madison & University of Wisconsin-Oshkosh, *The Journal of Federalism* volume 36 number 2, pp 213-229.
- Gamkhar, Shama & Wallace Oates. 1996. Asymmetries in response to increase And decrease in intergovernmental grants: Some empirical findings. *National Tax Journal* 49 (4): 501-512.
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Hidayat, Paldi, Wahyu Ario Pratomo & D. Agus Harjito. 2007. "Analisis Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota Pemekaran Di Sumatera Utara," *Jurnal Ekonomi Pembangunan*: 213-222.
- Kuncoro, Mudrajat, 2004. *Otonomi & Pembangunan Daerah Reformasi. Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Legrenzi, Gabriella & Costas Milas. 2006. Asymmetric and Non-Linear Adjustments in Local Fiscal Policy. Keele University, *Keele Economics Research Papers*.
- Maimunah, Mutiara. 2006. *Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera*, SNA IX, Padang 23-26 Agustus 2006.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi, Yogyakarta.